

## Tujuh Buku Memoar tentang Pulau Buru

Oleh: **Dr. Zeffry Alkatiri**  
(FIB-UI)

Email: Zeffry\_al@yahoo.com

**Abstrak:** *Otobiografi atau juga memoar merupakan sumber rujukan untuk penulisan sejarah. Telah banyak diterbitkan di Indonesia berbagai memoar dari berbagai tokoh dengan berbagai pengalaman hidupnya. Sejak tahun 1989 sampai akhir tahun 2006 ini tercatat telah diterbitkan oleh beberapa penerbit, tujuh buku memoar berkaitan dengan pemukiman tapol PKI yang ada di Pulau Buru. Pemerintah Orde Baru secara bertahap telah memulangkan eks Tapol Pulau Buru ke tempatnya masing-masing tahun 1977--1979. Dari ribuan eks Tapol itu tercatat baru 6 orang yang membuat memoar tentang kehidupan mereka selama diasingkan di Pulau itu. Enam orang dengan latar belakang profesi yang berbeda itu menuliskan memoar mereka dengan kecenderungannya bahasa dan arah masing-masing. Makalah ini akan memperlihatkan hubungan teks dan konteks mengapa buku tersebut diterbitkan. Selain itu juga akan memperlihatkan perbedaan dalam cara pengungkapan memoar dari masing-masing penulisnya. Makalah ini bertujuan untuk memperlihatkan adanya memoar yang dapat juga dijadikan sumber rujukan dalam melihat perkembangan sejarah Indonesia kontemporer.*

**Kata Kunci:** Memoar, Tapol, dan Pulau Buru

### Spesifikasi buku dan Latar Belakang Penulis

1. Pramoedya Ananta Toer. 1995. *Nyanyian Sunyi Seorang Bisu I: Catatan dari Pulau Buru*. Jakarta. Lentera. Berisi 319 halaman. Pertama kali diterbitkan di Belanda dengan judul *Lied van een Stomme*, 1988 dan 1989 (dua jilid). Disertai dengan lampiran foto dan lampiran nama-nama tapol yang meninggal di Pulau Buru, peta kondisi, dan situasi Pulau Buru,

Pramoedya Ananta Toer, dikenal sebagai sastrawan yang dianggap berafiliasi dengan Lekra dan PKI. Pramoedya menjadi tapol selama 14 tahun (1965--1979) selama 10 tahun berada di pengasingan Pulau Buru dengan tuduhan yang tidak jelas dan tanpa proses pengadilan. Ditangkap pada tanggal 13 Oktober 1965 dan dibebaskan dari Pulau Buru 21 Desember 1979.

Seperti yang diberitakan oleh penerbitnya, bahwa naskah buku ini disunting dari kertas-kertas berserakan berisi catatan berharga yang ditulis tidak teratur dari waktu ke waktu hanya bila keadaan memungkinkan selama tahun 1969-1979 (hal vi). Diakui oleh Pramoedya bahwa konsep dasar penulisan buku ini berasal dari permintaan kapten IM Sudiraka, Komandan Unit III yang meminta kepada Pramoedya agar menuliskan suka duka hidup di Pulau Buru (hal 44). Diakui olehnya bahwa izin menulis baru diberikan pada tahun 1973. Pemberian izin dan dorongan untuk menulis juga diberikan pada tahun 1976, ketika Dan Inherab, Kolonel Sutikno meminta kepada Pramoedya agar menuliskan pengalaman pribadinya selama di Mako (hal 82). Bahkan sempat diminta untuk membuat komik dan diminta membuat riwayat hidup beberapa orang perwira (hal 86 dan 89). Hal itu disadari oleh Pramoedya bahwa walaubagaimanapun pada suatu saat dia akan

menuliskan dan menyusun memoir pribadinya, apalagi sebagai pengarang Indonesia (hal 82). Sejak itu Pramoedya mulai menuliskan memoarnya. Akan tetapi sembilan buku tulis yang telah terisi pernah disita dan tak pernah dikembalikan lagi oleh Wadan Tefaaf, Letkol Soetarto (hal 80).

Seperti diakui oleh penulisnya, bahwa buku ini ditulis terburu-buru tanpa diperiksa kembali, kecuali di beberapa bagian. Naskah buku ini mulai ditulis tahun 1973, ketika Pramoedya mendapat izin untuk boleh menulis. Kesempatan menulisnya tergantung pada intuisi keamanan sebagai tapol yang menyebabkan tulisannya tidak terencana dan tidak terpelihara formatnya. Sebagian catatan itu sempat dirampas oleh petugas dan sebagian dapat diselamatkan oleh beberapa teman penulis. Sebagian catatan ditulis dengan bentuk surat yang ditujukan kepada anaknya di Jakarta.

Buku Pramoedya sebenarnya tidak ditulis seorang diri, dalam beberapa kesempatan ada beberapa tapol yang diminta atau tidak, memberikan catatan pribadinya kepada Pramoedya dalam menanggapi suatu kejadian di unitnya (hal 211 dan 269). Hal itu juga diakui olehnya. Umumnya masyarakat tapol menganggap Pramoedya mempunyai legalitas untuk menulis sejak tahun 1973. Oleh karenanya banyak tapol manaruh cacatan-catatannya padanya. Pram oleh rekan tapol dianggap sebagai banker catatan (hal 276).

Penulisan ini didasarkan pada pertimbangan apa dan bagaimana pun pengalaman pribadi, apalagi dituliskan, ia menjadi bagian dari pengalaman suatu bangsa dan umat manusia pada umumnya. Menurut Pramoedya, pengalaman merupakan hak pribadi yang tidak dapat dirampas (hal viii-ix).

**2.** Pramoedya Ananta Toer. 1997. *Nyanyian Sunyi Seorang Bisu II*. Jakarta. Lentera Pustaka Alternatif. (295 halaman). Buku Pramoedya kedua ini sebelumnya diterbitkan di negeri Belanda dengan judul *Lied van een Stomme*, 1989, penerbit Unie Boek, dalam dua jilid sekaligus. Buku ini diterbitkan sebagai kenang-kenangan Pramoedya berusia 72 tahun. Buku ini lebih banyak menceritakan tentang kehidupan Pramoedya dan keluarganya. Sedangkan tentang pengasingannya di Pulau Buru hanya sedikit.

Buku kedua ini lebih bersifat persuratan yang ditujukan kepada tiga anaknya yang mengabarkan dan menceritakan tentang latar belakang kehidupannya. Seperti pengakuannya lewat surat kepada anaknya, bahwa sejak 14 November 1973, dia tidak lagi bekerja di ladang atau sawah. Pramoedya hidup dari keringat teman-temannya yang

memberi makan dan minum, serta kebutuhan hidup lainnya, seperti pakaian, rokok, sabun, kertas pita karbon, merawat mesin ketik, mengobati. Kedudukan Pramoedya dianggap sebagai tempat untuk mengadu dari para tapol yang terkadang datang dari unit yang terjauh (hal 272). Sama seperti buku yang pertama, dalam buku keduanya ini juga terdapat beberapa lampiran berupa beberapa foto dan epilog dari penyuntingnya.

3. Hersri Setiawan. 2004. *Memoar Pulau Buru*. Magelang: IndonesiaTera. Berjumlah 615 halaman. Terdiri dari lima bab. Tambahan kata pengantar dan epilog. Tentang Pulau Buru terdapat pada Bab II dan Bab III. Buku ini lebih banyak bercerita tentang pribadi penulis dan pribadi beberapa kawan penulis sesama tapol hidup di Pulau Buru.

4. Hersri Setiawan. 2006. *Diburu di Pulau Buru*. Yogyakarta. Galang Press. Berisi 4 bab dan satu bab lampiran dengan jumlah halaman 228, dihiasi beberapa ilustrasi atau sketsa oleh Gumelar Demokrasno, juga seorang eks-tapol Pulau Buru.

Hersri Setiawan, Mantan aktivis Lekra dan eks-Tapol Buru. Dikenal sejak tahun 1954 sebagai penulis kritik, esai, dan cerita pendek di beberapa koran dan majalah sastra. Sebagai tapol intelektual di Pulau ia sempat mengerjakan beberapa pekerjaan intelektual, seperti mengerjakan tugas terjemahan kursus kilat intelejen dan membuat skripsi seorang komandan. Sepulang dari Pulau Buru, ia menikah dengan seorang perempuan Belanda dan tinggal lama di Belanda. Pada tahun 2000-an, ia mengeluarkan beberapa buku tentang Pulau Buru, seperti *Humoria Homo Buruensis* (tp 1987), *Kamus Gestok* (Galang Press 2003), *Aku Eks Tapol* (Galang Press 2003), *Negara Madiun* (IndonesiaTera 2004), *Memoar Pula Buru* (IndonesiaTera 2004), dan *Diburu di Pulau Buru* (Galang Press 2006). Di antara penulis lain, Hersri paling banyak menulis dan mengungkapkan tentang Pulau Buru.

Hersri masuk ke Pulau Buru, sebagai Tapol gelombang kedua, 1970, bersama 750 (850) orang lainnya. Mulai diberangkatkan dari Pulau Nusa Kambangan 19 November dan sampai di Pulau Buru 25 November. Penempatan mereka di Pulau Buru dinamakan sebagai Tempat Pemanfaatan (Tefaaf) dan pada tahun 1973 berganti menjadi Badan Pelaksana Resettlement (pemukiman kembali) Tapol Pulau Buru di bawah (BAPRERU) (hal 13-19 dan 34 dan 99).

5. Adrianus Gumelar Demokrasno. 2006. *Dari Kalong sampai Pulau Buru*. Yogyakarta. Pusat Sejarah dan Etika Politik. 142 halaman ilustrasi dengan narasi: Harsutejo.

Adrianus Gumelar Demokrasno. Adalah sarjana ASRI tahun 1960. Bergiat dalam kegiatan seni lukis di Jakarta. Pernah ikut dalam proyek Musium Perjuangan di Yogyakarta. dia juga menjadi anggota Sanggar Bumi Tarung yang berafiliasi dengan Lekra dan PKI. Setelah tahun 1965, ia tidak bekerja lagi di Sekretariat Negara untuk membuat poster tamu Negara. Tahun 1968 ia ditangkap dan dijadikan tahanan di Markas Kalong Gunung Sahari Jakarta yang terkenal dengan kekejamannya. Tahun 1969 ia dipindahkan ke Pulau Buru dan tinggal di sana sampai tahun 1979. Sebagian sketsanya dibuat di sana dan sebagian lagi dibuat setelah dia bebas. Setelah bebas dia terus aktif sebagai pelukis.

6. Kresno Saroso. 2002. *Dari Salemba ke Pulau Buru: Memoar Seorang Tapol Orde Baru*. Jakarta: ISAI dan Pustaka Utan Kayu. Terdiri dari 9 bab berjumlah 324 halaman. Bab tentang Pulau Buru dimulai pada bab 6-9, ditambah ilustrasi peta Pulau Buru dan beberapa foto kenangan yang tersebar di beberapa halaman.

Kresno Saroso, Mahasiswa Fakultas Kedokteran UI 1962, ia pernah menjadi anggota CGMI (Central Gerakan Mahasiswa Indonesia). Sebelum lulus, ketika duduk di tahun IV sudah keciduk dan kemudian dipenjarakan di beberapa tempat di Jakarta, Salemba, Tangerang, Nusa Kambangan, dan terakhir ke Pulau Buru.

Pembukaan buku ini dimulai dengan kalimat: Memoar ini sebetulnya kisah seorang anak manusia biasa, bukan seorang yang terkenal. Meskipun bukan seorang terkenal, mungkin ada juga segi-segi menariknya (hal 1).

7. Suyatno Prayitno. 2003. *Kesaksian Tapol Orde Baru: Guru, Seniman, dan Prajurit Tjakra*. Jakarta: Institu Studi Arus Informasi dan Pustaka Utan Kayu.

Merupakan rangkaian tiga memori dari tiga orang yang dituduh sebagai tapol PKI atau membantu kegiatan PKI. Akan tetapi dalam penulisan ini hanya akan dikemukakan tentang memoar dari Saudara Suyatno Prayitno yang diangsiangkan ke Pulau Buru.

Suyatno Prayitno adalah seorang guru di Solo. Ditahan karena menjadi anggota PGRI non vak sentral. Ditangkap oleh TNI pada tanggal 12 November 1965 dan dijebloskan ke beberapa penjara di wilayah Solo, Nusa Kambangan, dan akhirnya dikirim

ke Pulau Buru pada Januari 1974. Sesudah dibebaskan dia diwajibkan melapor kepada Koramil setempat.

### **Konsep dasar Pengasingan**

Dasar pijakan hukum penempatan para tapol ke Pulau Buru adalah Keputusan Presiden Suharto No 16 tahun 1969 yang membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) dengan tugas memulihkan keamanan dan ketertiban dari akibat peristiwa pemberontakan G30S/PKI serta kegiatan ekstrim dan subversi lainnya serta mengamankan kewibawaan pemerintah demi kelangsungan hidup Pancasila dan UUD 45. Setelah itu Kopkamtib membuat petunjuk pelaksanaan dengan No Pelak 002/Kopkam/10/1969 tentang kebijakan penyelesaian tahanan G30S PKI pada umumnya.

Dasar hukum lainnya adalah Penpres 3 tahun 1968 yang menjadi Undang-Undang Nomor 5 tahun 1969 tentang Wewenang Jaksa Agung melakukan pengawasan dan pengusiran. Atas dasar itu kemudian PangKopkamtib mengeluarkan keputusan No 009/Kopkam/2/1969 dan No 017/Kopkam/1969 yang menunjuk Jaksa Agung agar menyelenggarakan penampungan pemeliharaan, dan pemanfaatan tahanan G30S PKI golongan B di Pulau Buru (Hersri, 2006: 165).

Dalam pelaksanaannya dilakukan prosedur sebagai berikut:

- a. Penampungan meliputi (1) penelitian, penelahaan, dan penentuan tempat-tempat penampungan yang memenuhi syarat keamanan rohani dan jasmani, kesehatan, dan tersedianya kemungkinan untuk pemanfaatan tenaga para tahanan serta keluarganya, (2) penelitian dan pembinaan tahanan di tempat pemanfaatan, (3) penelitian dan pembinaan anggota keluarga para tahanan yang kelak akan disusulkan, sesuai dengan perkembangan keadaan, (4) pembangunan tempat penampungan, (5) penentuan jadwal pemberangkatan secepat-cepatnya, tempat dan fasilitas yang diperlukan, (6) pemberangkatan para tahanan ke tempat pemanfaatan, serta tindakan pengamanan selama dalam perjalanan.
- b. Pemeliharaan meliputi (1) penyediaan dan perawatan alat-alat serta fasilitas lainnya yang diperlukan untuk pemanfaatan para tahanan, (2) pemeliharaan tempat pemanfaatan serta alat dan fasilitasnya, (3) perawatan para tahanan serta keluarganya, (4) perawatan perorangan dan satuan-satuannya yang

menyelenggarakan pengamanan intern dan administrasi tempat pemanfaatan, (5) pemeliharaan alat dan fasilitas yang diperlukan untuk administrasi dan pengamanan intern tempat pemanfaatan.

- c. Pemanfaatan meliputi (1) perencanaan, persiapan, dan pengaturan pelaksanaan pemanfaatan para tahanan, (2) pengawasan terus menerus atas kegiatan pemanfaatan itu sendiri.

Adapun prinsip yang digariskan pemerintah untuk pelaksanaan tindakan tersebut, ialah tidak mengganggu keamanan nasional, sesuai dengan perundangan yang berlaku, dan tahanan harus memproduksi sendiri kebutuhannya, sebagai penunjang pelaksanaan pembangunan lima tahun.

Pemilihan Pulau Buru didasarkan karena, (1) Pulau Buru terletak jauh dari suhu politik ibu kota yang sangat peka (2) untuk meringankan beban keuangan pemerintah demi suksesnya program Pelita. Di Buru diharapkan para tahanan akan bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka sendiri, tanpa tergantung kepada anggaran keuangan Negara dengan bertitik tolak pada gagasan transmigrasi, (3) meneruskan pembangunan pemerintah sejak tahun 1954 yang mengusahakan bendungan irigasi pertanian.

Mengingat terbatas waktu dan biaya, tim survey awal dilakukan pada tahun 1969 yang dipersiapkan untuk 2500 tapol gelombang pertama yang menempati areal seluas 2500 ha.

Laporan hasil survey sebagai berikut

1. Pertanian ladang sawah tadah hujan pada areal bekas hutan, akan bisa berhasil, sehingga mampu berswasembada pangan dalam jangka pendek, yaitu sekitar 1-2 tahun sesudah pembukaan ladang.
2. usaha pertanian, peternakan, perikanan darat dan kehutanan bisa diharapkan berhasil baik.
3. pengairan dalam jangka pendek tidak sulit diusahakan dan perluasan sawah dapat dilakukan ke arah hulu sungai Wai Apo yang membentang dan membelah Pulau Buru.
4. Pengairan dan pemupukan mutlak diperlukan untuk menjamin produksi jangka panjang.
5. diperlukan survey lebih lanjut, khususnya untuk menyediakan tempat pemanfaatan bagi 7500 orang tapol lainnya.

Tim mengadakan tindakan lanjut pelaksanaan dengan dibantu oleh Departemen Transmigrasi dan petugas Zidam Patimura membangun tiga lokasi tefaaf dan sebuah tefaaf transito. Prosedur ini sesuai dengan pernyataan Jaksa Agung Sugiharto yang berkeinginan untuk mengisolasi tapol PKI jauh-jauh dari pusat kekuasaan dalam beberapa kamp kosentrasi di Pulau Buru dengan memanfaatkan tenaga mereka secara berdikari (Hersri, 2006: 165-170).

Menurut Prayitno, alasan pemerintah menahan tapol ke Pulau Buru karena beberapa alasan, seperti (1) agar tapol tidak dapat lari. Dengan kondisi alam seperti Pulau Buru, tapol sulit untuk melarikan diri. (2). penduduk menjadi tidak akrab, karena sudah diberi tahu bahwa tapol adalah orang jahat dan kejam, (3) untuk menghemat biaya Negara sebab para tapol diharuskan berswasembada dan menyiapkan kebutuhannya sendiri secara berdirikari, termasuk membangun barak perumahan (Prayitno, 2006: 77).

Dasar diasingkannya para tapol ke Pulau Buru ditegaskan kembali oleh Jaksa Agung Sugiharto, pada awal tahun 1971, yang dikatakan dalam pertemuannya dengan para perwakilan Diplomat di Jakarta, bahwa mereka itu adalah duri dalam masyarakat yang harus disingkirkan (Hersri, 2006: 100).

Pernyataannya itu dipertegas lagi dalam harian *Angkatan Bersenjata*, 13 Februari 1971 bahwa jika mereka dikembalikan ke masyarakat terlalu mengandung resiko, bagi keamanan umum maupun bagi tapol sendiri (Hersri, 2006: 149-150).

Tambahan dari pernyataan Jaksa Agung, Sugiharto yang menyatakan bahwa pembuangan tapol ke Pulau Buru merupakan proyek kemanusiaan untuk merehabilitasi para tapol golongan B agar kembali menjadi manusia pancasilais dan tidak lagi menganut idiologi Komunis (Krisnadi dalam Demokrasno, 2006: xxi).

Para tapol Pulau Buru digolongkan sebagai tapol PKI golongan B yang merupakan hasil seleksi dari golongan A atau yang terlibat langsung dan dikenai hukuman mati. Tapol golongan B adalah tapol yang dianggap terlibat tidak langsung dan dianggap hanya sebagai kader). Sedangkan tapol golongan C dianggap tapol PKI yang ikut-ikutan (hal 150). Atas dasar seleksi itu yang dilakukan terus menerus selama tahun 1968-1976, maka banyak tapol yang naik ke jenjang golongan B atau banyak juga yang turun menjadi tapol golongan C (Hersri, 2006:151-152).

Atas dasar seleksi itu golongan B menjadi lebih banyak ketimbang golongan A maupun golongan C. Jumlah keseluruhan Golongan B yang ditahan di Pulau Buru mencapai 12.000 orang (Hersri, 2006: 52).

## **Sudut Pandang Para Penulis**

### **1. Keberangkatan dan Kedatangan**

Di bawah ini akan dikemukakan deskripsi kronologis tentang keberangkatan dan kedatangan tapol dari lima orang penulis, yang melihat dari sudut pandang mereka masing-masing.

#### **1.1 Pramoedya Ananta Toer**

Berangkat tepat pada tanggal 17 Agustus 1969 dari Nusa Kambangan bersama 800 Tapol lainnya, yang berasal dari berbagai penjara di Pulau Jawa (hal 2). Rombongan Pram adalah rombongan gelombang pertama yang diberangkatkan ke Pulau Buru. Sebagian tapol, termasuk Pramoedya berfikir bahwa kepergian mereka ke Pulau Buru dianggap lebih baik daripada kehidupan mereka di penjara yang sempit (hal 9). Pramoedya memandang bahwa pengasingan tapol PKI ke Pulau Buru adalah juga atas inisiatif Negara Barat (AS) yang mempengaruhi dan membantu pemerintah Orde Baru (hal 10).

Setelah sepuluh hari, mereka mendarat di pelabuhan Namlea yang sepi dan dijemput oleh satu regu militer dari divisi Patimura yang siap dengan gagang senapan dan tinjunya (hal 13). Setelah mendarat, bersama dengan Tapol lainnya sebanyak 500 orang, Pramoedya berjalan sejauh tiga setengah kilometer, selama enam jam menuju Unit III, yang kelak dinamai Wanayasa olehnya. Ditempat itu memasuki barak-barak yang dipagari kawat berduri, yang mirip dengan kamp konsentrasi (hal 47-48 dan 62).

Selama enam hari Pramoedya beserta Tapol lainnya membersihkan lahan rumput dengan tangan, tanpa alat. Lahan itu nantinya dipergunakan sebagai areal persawahan dan perladangan (hal 50). Semua orang dari berbagai tingkatan diharuskan bekerja sama mencangkul untuk membuat areal persawahan sebagai bekal hidup sebab jaminan jatah makan hanya berlaku sampai delapan bulan saja dan itu pun sebelumnya telah banyak dikurangi. Pramoedya menempati lahan Savanajaya (hal 51).

Pramoedya termasuk rombongan awal, sehingga lebih jernih dalam melihat tempat pengasingan yang belum tergarap itu. Walaupun bab tentang kedatangan cukup tebal, akan tetapi sebenarnya pembicaraan mengenai kedatangan hanya dapat diperas menjadi

tiga alinea. Selebihnya penulis lebih banyak membicarakan kondisi Pulau Buru, alasan pengasingan yang tidak manusiawi, dan manusia yang menghuninya.

## **1.2 Hersri Setiawan.**

Hersri masuk ke Pulau Buru, sebagai Tapol gelombang kedua, 1970, bersama 750 (850) orang lainnya. Mulai diberangkatkan dari Pulau Nusa Kambangan 19 November dan sampai di Pulau Buru 25 November. (di buku pertama dikatakan mereka berangkat dari Tanjung Priok, dan sampai di Buru 12 Novemeber) Penempatan mereka di Pulau Buru dinamakan sebagai Tempat Pemanfaatan (Tefaaf) dan pada tahun 1973 berganti menjadi Inrehab (instalasi rehabilitasi Buru) yang berada di bawah Badan Pelaksana Resettlement (pemukiman kembali) Tapol Pulau Buru (BAPRERU) (hal 13-19 dan 34 dan 99). Mereka sebelum berangkat sudah mengenakan seragam tapol yang diberi nomor di dada, di pantatnya, dan nomor foto. Luas Pulau Buru sekitar 9000 km<sup>2</sup>, terdiri dari wilayah Buru Selatan dan Utara. Wilayah Selatan sudah ditempati oleh penduduk setempat, sedangkan wilayah Utara digunakan untuk pemukiman Tapol PKI (hal 16). Akan tetapi dalam buku lain, disebutkan bahwa Hersri diberangkatkan dari Tanjung Priok bersama 850 tapol yang berasal dari penjara Salemba dan penjara Tanggung. 500 orang dibawa ke unit XIV dan sisanya 350 orang dibawa ke unit XV (hal 170). Mereka tiba di Buru pada tanggal 12 Agustus. Di dua buku Hersri ada ketidaksesuaian tanggal keberangkatan dan kedatangan tapol ke Buru. Hal ini mengundang pertanyaan, tanggal mana yang sebenarnya ?

Setiap pendatang baru ditempatkan di unit Transito yang terletak di kampung Jiku Kecil, yang juga berfungsi sebagai penjara. Di transito mereka tinggal selama 4 hari. Tanggal 29 November sebanyak 436 dipindahkan ke unit IV atau unit Sanleko yang berjarak 3 km dengan berjalan kaki. Mereka bergabung dengan 174 Tapol gelombang pertama dan kedua tahun 1969 yang sudah lebih dulu menempati lahan tersebut. Mereka ditugaskan untuk membuka lahan pertanian seluas 80 ha (sawah dan ladang) secara berangsur-angsur. Sedangkan selebihnya (sebanyak 1500 tapol) ditinggal sebagai tukang (korve) pengangkut barang di pelabuhan (hal 20-22). Di sini juga ada ketidakcocokan antara data di buku pertama dengan buku keduanya tentang jumlah tapol yang dikirim dan jumlah tapol yang dipisah.

### **1.3 Adrianus Gumelar Demokrasno**

Sudut pandang lewat sketsa ini terbatas hanya memperlihatkan sketsa pelukis ketika datang dan tinggal di Pulau Buru. Dari penjara Salemba, Gumelar diberangkatkan dengan Kereta Api tertutup dari stasiun Kota Beos ke Cilacap dan terus ke Nusa Kambangan. Sejak dari Salemba, tiap tapol diberikan baju seragam dengan nomor tapol yang tersemat di dada dan di pantat (hal 23-24). Setelah mengendap selama tiga bulan di Nusa Kambangan, para tapol sebanyak 3000 orang diberangkatkan pada tahun 1970 menuju Pulau Buru (hal 33). Setelah itu, berlayar selama kurang lebih seminggu, mereka sampai di pelabuhan Namlea, Pulau Buru. Mereka dibariskan, sementara sejumlah korque pengangkut sibuk memindahkan barang dari kapal ke gudang transito (hal 34-35). Para tapol dibagi menjadi rombongan yang terdiri dari 500 orang menuju tempat pemukiman yang tersebar di wilayah tengah dan utara Pulau Buru. Para penduduk telah diindoktrinasi bahwa para tapol merupakan orang yang berbahaya dan diingatkan jangan bergaul dengan mereka (hal 36). Pernyataan terakhirnya itu juga terdapat pada buku Hersri dan Suyitno. Walaupun sketsa karya Demokrasno secara artistik dirasakan kurang, akan tetapi melalui sketsanya itu, maka gambaran Pulau Buru menjadi lebih jelas.

### **1.4 Kresno Saroso**

Di Limus Buntu, Nusa Kambangan, para tapol itu kurang lebih bermukim selama 10 hari. Pada hari terakhir mereka dipanggil dan diberikan nomor foto, kemudian diberikan pakaian seragam drill coklat dengan nomor tapol yang tertera di sebelah kiri kantong. Kresno mendapat nomor 4300 dan diberangkatkan secara berurut menuju kapal untuk berangkat ke Pulau Buru bersama 1000 tapol lainnya (hal 175-176). Dalam bukunya tidak disebutkan kapan Kresno diberangkatkan dan tiba di Pulau Buru, dari analisis pernyataannya diperkirakan Kresno tiba di Pulau Buru sekitar akhir tahun 1970 atau awal tahun 1971. Sampai mereka di pelabuhan Namlea dan menginap selama seminggu di barak-barak dan diberi makan hanya nasi putih plus garam (hal 179).

Untuk menurunkan barang-barang pasokan dari Bapreru, maka penguasa memakai tenaga murah yang tidak usah dibayar, yakni para tapol korque pengangkut barang. Pasokan berupa ikan asin, bulgur, susu bubuk, kacang ijo, kacang tanah, gula pasir, garam, beras, kelambu, dan lain-lain untuk keperluan para tapol selama 8 bulan konsolidasi di unitnya. Para tapol yang tidak diupah itu, sudah tentu mencari sesuatu sebagai kompensasi atas tenaga yang dikeluarkan dengan cara mengutil (hal 180).

Mengenai barang-barang para tapol yang dititipkan kepada petugas ditransito, ternyata dapat diambil kembali (hal 181). Padahal barang yang dititipkan bisa saja hilang diambil atau dirampas petugas. Hal itu dialami oleh Hersri dan Suyitno.

Setelah seminggu tinggal di Transito, rombongan berangkat menuju unit masing-masing yang sudah ditentukan. Kresno menuju Unit IV Savanajaya dengan terlebih dulu naik *landing craft* menyeberangi teluk Namlea untuk sampai di pantai desa Sanleko (hal 181). Mereka melewati barak bekas peninggalan tapol angkatan 1969 dan menuju barak baru yang berjarak 1 km dari kompleks barak lama di Unit IV Savanajaya yang dulu masih berbentuk padang rumput yang telah diolah para tapol sebelumnya menjadi areal persawahan (hal 182 dan 186).

### **1.5 Suyatno Prayitno**

Sampai di Pulau Buru, untuk dapat mendarat di Sanleko memerlukan perahu-perahu kecil untuk membawa kami dari kapal. Setelah mendarat, mendapat instruksi dari para petugas dan kemudian berangkat menuju lokasi unit Sawunggaling yang berjarak sekitar 30 km. Gitar yang saya bawa diambil oleh seorang tentara, katanya untuk dibawakan supaya ringan. Saya tidak dapat mengenali identitasnya karena sudah gelap. Saya tidak berani berbuat apa-apa menyerahkan apa saja yang mereka minta dan kehendaki. Saya hanya mengeluh dan menyesalkan kebodohan saya. Benda-benda lain seperti cincin, akik, sarung, ransel, sepatu baru, dan uang dirampas oleh para pengawal (hal 71). Benda-benda bawaan tapol bisa dimiliki oleh para petugas dengan cara pencurian, meminta dengan baik-baik, dan juga dengan cara paksaan. Hal itu juga diungkapkan dalam buku Pramoedya, Hersri, maupun Kresno.

## **2 Kondisi Pulau Buru dan Tugas para Tapol**

Di sesi ini akan dikemukakan tentang rekaman dari para penulis mengenai kondisi yang diperhatikan oleh mereka dan tugas keseharian yang dijalankan sebagai tapol. Pada sesi ini para penulis memperlihatkan kesamaan dalam merekam tugas mereka dan bagaimana mensiasati tugas keseharian mereka.

### **2.1 Pramoedya Ananta Toer**

Menurut Pramoedya bahwa Pulau Buru tidak layak dihuni dan dieksploitasi menjadi areal persawahan dan perladangan sebab kultur tanahnya bersifat padang rumput dan tanahnya masih muda dan kurang mengandung mineral yang dibutuhkan bagi tanaman,

seperti padi (hal 27). Pekerjaan yang dilakukan Pramoedya tidak hanya membuka lahan persawahan dan peladangan, akan tetapi juga membuka jalan serta membuka hutan untuk kebutuhan huma (hal 58). Pramoedya lebih suka bekerja dengan kelompok kecil di tepi hutan sebab dengan begitu dia dapat memperoleh kesempatan untuk merenung (hal 55). Pramoedya ditahan di Pulau Buru tidak sendirian, di sana dia juga ditemani oleh adiknya yang bernama Waluyadi Toer yang berada di Unit XII, sedangkan dua adiknya yang lain ditahan di dua tempat di Jakarta (hal 92).

Pramoedya menganggap Pulau Buru dan Tapol sebagai penghuninya merupakan koloni lepra yang di jauhi dan sengaja diasingkan dari kehidupan masyarakat yang Pancasila (hal 194). Pulau Buru memang sengaja dipilih oleh Pemerintah setelah disurvei dari beberapa tempat yang ada di Indonesia. Penjara buru yang kejam sengaja diberikan kepada para tapol, seperti dikatakan oleh Letkol Samsi sewaktu dia marah karena ada tapol yang melarikan diri. Dia mengatakan bahwa pemerintah sudah memperhitungkan sampai sedetail mungkin keadaan Pulau Buru, hingga dijadikan tempat untuk para tapol. Hutan di Buru tak ada yang dapat memberi makan, gunungnya gersang. Kalau lari ke hutan, tapol akan mati kelaparan atau mati dimakan binatang buas. Kalau berlindung kepada penduduk, mudah ketahuan karena wajah tapol berbeda dengan penduduk setempat. Laut sekitar Pulau Buru sangat ganas, kalau pun lari lewat laut, kematian akan memanti sebab tapol dianggap tidak mengenal cara berperahu di wilayah itu (hal 231-232). Keganasan alam itu, disadari oleh Pram, yang memberikan nasehat kepada tapol muda untuk menyadari kenyataan yang ada saja sebagai tapol yang mirip seperti ikan dalam penggorengan (hal 281). Pramoedya menyadari untuk menerima kenyataan yang ada itu dan dia pun kemudian secara pragmatis juga memanfaatkan waktu pengasingannya, sesuai dengan profesinya.

## **2.2 Hersri Setiawan**

Dengan masuknya tapol baru di Unit itu, maka sejak desember 1970 namanya diubah menjadi Unit Savanajaya. Di tempat itu dan juga di unit lainnya, mereka diwajibkan untuk tidak hanya memberi makan diri sendiri dan membangun barak mereka sendiri, akan tetapi juga memberi makan dan membuatkan barak untuk para petugas yang menjaganya, sebanyak 30 orang tiap unit. Untuk kebutuhan itu, tiap hari ditempatkan 50 tapol secara bergilir untuk melayani kebutuhan para petugas (hal 22-25).

INREHAB (Instalasi Rehabilitasi) Pulau Buru meliputi dua puluh dua unit pemukiman tapol, yang berada di bawah Badan Pengelola Resettlement Pulau Buru yang berada di Jakarta. Jumlah tapol menurut perhitungan Hersri berjumlah kurang lebih 12.000 orang (11.948 tapol) (hal 223 dan 526). Berdasarkan pengelolanya, maka Buru menjadi Pulau tertutup (hal 526). Pada tahun 1972, desa Savanajaya kemudian dijadikan desa tapol berkeluarga yang mencapai lebih 200 kepala keluarga (hal 224). Berdasarkan surat keputusan Komkamtib tanggal 15 November 1978, No skep 60/Kopkam/XI/1978 tapol berkeluarga dari desa Savanajaya dinyatakan dibebaskan dari status tapol (hal 226). Pada tanggal 14 Oktober 1979, sekitar 160 KK penghuni desa itu, pulang ke Jawa (hal 228). Akan tetapi ada juga yang tidak ingin pulang dengan beberapa alasan (hal 231).

Menurut Hersri melihat kondisi Pulau Buru, menandakan hidup baru yang kering kerontang serta sepi bakal menunggunya (hal 115). Ternyata ada ketidakcocokan antara berita dengan kenyataan (hal 120). Gejala alam juga menjadi petanda akan betapa kerasnya hidup di sana (hal 130). Di sana terdapat Unit Gembong yang dihuni oleh para gembong elite PKI atau tokoh yang berafiliasi dengan PKI (hal 121). Lokasi itu terletak di unit III Wanayasa yang kemudian dipindahkan ke Unit XV. Penamaan unit lainnya, adalah Unit XIV Bantalareja dinamakan unit Jakarta murni karena kebanyakan penghuninya berasal dari Jakarta. Unit III Wanayasa penghuninya kebanyakan berasal dari Jawa Timur dan Unit XV Indrapura, penghuninya kebanyakan berasal dari Jawa Tengah (hal 170).

Ternyata kebutuhan petugas bukan hanya makan dan tempat berteduh saja, akan tetapi juga memanfaatkan tenaga Tapol untuk mendapatkan tambahan gaji mereka yang kecil dengan mengeksploitasi kayu hutan di sekitar daerah Pulau Buru (hal 26). Jadi sesuai dengan namanya Teffat (tempat pemanfaatan) maka para tapol dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup para petugas (hal 59).

Bahwa hidup tapol kemudian hanya menjalankan perintah dari para petugas jaga, melalui bunyi lonceng yang dibunyikan setiap hari, sebagai tanda perintah (hal 123 dan 138). Jika tapol melanggar ketentuan yang ada, maka sanksi hukumnya bisa untuk perseorangan atau kolektif untuk satu barak (hal 155). Bagi Hersri, Pulau Buru merupakan pulau *Purgatorio* atau pulau pensucian diri (hal 528). Jika diperhatikan Hersri lebih detail merekam data kegiatan dan kondisi Pulau Buru, terbukti dia sudah menulis lima buah buku yang berkaitan dengan tapol Pulau Buru.

### **2.3 Adrianus Gumelar Demokrasno**

Para tapol itu kemudian menempati barak-barak di Unit IV Savanajaya yang dikelilingi oleh pagar kawat berduri. Di luar terdapat bangunan yang disediakan untuk rumah komandan yang disebut dengan wisma beserta wakilnya. Komandan berpangkat Kapten sedangkan wakilnya berpangkat pembantu letnan. Tiap barak diisi oleh 50 orang tapol yang dibagi menjadi 5 regu. Di depan gerbang barak terdapat pos penjagaan yang dihuni oleh 12 orang petugas yang mengawasi mereka sepanjang hari (hal 37-38). Tanpa mendapatkan waktu istirahat para tapol diperintahkan untuk memabat hutan savana untuk membuka persawahan dan perladangan (hal 40). Tapol sering mendapatkan penghinaan dari para petugas yang tidak manusiawi (hal 41 dan 48). Bahkan mereka sengaja mencari kesalahan dari para tapol untuk dihukum (hal 73). Untuk mendapatkan tambahan makanan (gizi) tapol menyisihkan waktunya untuk berburu, memancing, berternak, berladang, mencari sagu, dan juga mencuri dari pekerjaan mereka sendiri (hal 55, 90, dan 97). Tapol bekerja rodi ke sawah dan ladang pada jam 06.00 dan pulang jam 17.00 sore, tujuh hari dalam seminggu, tanpa istirahat, kecuali hari-hari besar dan itu pun terkadang hanya setengah hari (hal 74).

### **2.4 Kresno Suroso**

Mereka tinggal di barak-barak yang sama dengan bentuk barak lama, yang terdiri dari 5 buah barak sejajar yang dipisahkan oleh sebuah lapangan kecil dan dikelilingi oleh pagar kawat berduri. Di luar terdapat wisma komandan, gudang, asrama tonwal, dan rumah sakit darurat (hal 183). Perlengkapan dapur yang disediakan oleh Bapreru, adalah drum-drum besar untuk masak, 10 buah kuali-kuali untuk masak, 10 buah ember plastic. Untuk bekerja disediakan, cangkul, arit, kapak, gergaji, dan parang yang harus disimpan di gudang (hal 186).

Selama masa konsolidasi, para tapol diberi 250 gram beras dan 250 gram bulgur yang dijadikan tiga kali sehari. Sarapan pagi, jam enam pagi sebelum para tapol berangkat kerja. Untuk sarapan diberi lauk ikan asin. Untuk makan siang diberi sayur daun singkong dan malam tidak disebutkan (hal 185).

Berbeda dengan Pramoedya, menurut Kresno, tanah Pulau Buru mungkin lebih subur dari tanah Pulau Buton yang berbatu mengandung aspal. Di Buru tak pernah sewaktu mencangkul terantuk batu (hal 188). Hal itu diungkapkan olehnya bahwa untung Pulau Buru masih merupakan tanah yang cukup bersahabat. Tanaman kunyit, laos, temu

giring, temu kunci, kunyit, cabe rawit banyak tumbuh liar di mana-mana yang bisa diambil untuk tambahan makan. Sedangkan bahan makanan yang dapat ditukarkan adalah tomat, batatas, sawi putih, kacang panjang, dan lain yang dibawa ke pasar Namlea untuk ditukarkan dengan uang atau barang keperluan tapol lainnya. Selain itu, untuk mencukupi kebutuhan protein, para tapol memelihara ayam dan itik yang dapat dikonsumsi atau ditukar dengan uang (hal 196 dan 208).

Tetapi kalau ada kegagalan dalam proyek, misalnya paceklik atau terserang hama, penguasa tidak mau tahu. Kalau ada peristiwa seperti itu, para tapol disuruh cari makan sendiri. Pada waktu paceklik itu, tapol beralih makan singkong atau sagu. Ditambah dengan bahan protein lainnya yang didapat, seperti tikus, ular, ikan, babi hutan, anjing, dan keong (hal 194 dan 204). Hal lain yang dilihat Kresno adalah bahwa Tapol Islam yang menjalankan ibadah puas di bulan Ramadhon tidak mendapat dispensasi apa pun dari penguasa (hal 207).

## **2.5 Suyatno Pratitno**

Dalam catatan Prayitno, disebutkan bahwa pemerintah mendirikan unit tahanan sampai tahun 1975 berjumlah 20 unit. Tiap unit dihuni 700-1500 orang. Jadi ada 40.000 tapol (? , sic!) yang dibuang ke Pulau Buru (hal 77). Dapat dikatakan, catatan Prayitno tidak selengkap kawan-kawan lainnya. Apalagi mengenai jumlah tapol. Di buku Hersri disebutkan angka 12.000 orang tapol, akan tetapi di buku Prayitno disebutkan 40.000 tapol. Data ini terlalu berlebihan jika dihitung berdasarkan gelombang kedatangan yang dicatat oleh Hersri.

## **3. Hubungan antara Para Tapol dan Petugas Jaga**

Fenomena yang banyak dibicarakan oleh tapol adalah hubungan mereka dengan para petugas dan sesama tapol. Fenomena ini merupakan hal yang wajar sebab merupakan kegiatan sehari-hari mereka, yang sulit mungkin untuk dilupakan, seperti yang akan diutarakan oleh para penulis di bawah ini.

### **3.1. Pramoedya Ananta Toer**

Di Pulau Buru, tapol sering dipindah tempatkan ke unit lain secara bergantian. Hal ini mungkin untuk mengontrol kehidupan mereka (hal 91). Pramoedya menempati barak di unit Savanajaya. Pada tanggal 9 Oktober, dia sempat dikunjungi oleh Pangkopkamtib, Jendral Sumitro yang didampingi oleh Wing Wiryawan, Panglima Patimura (hal 20-21).

Setelah bertemu dan berdialog, Pramoedya bersama beberapa kawannya diintegrasikan sekitar hasil pertemuan mereka (hal 29).

Dalam wawancara terungkap bahwa Pramoedya mendapatkan kertas untuk menulis didapat dari penjualan ternak ayamnya (hal 26). Selain itu ia juga mendapatkan benda tersebut dari bingkisan beberapa temannya dan dari bingkisan Jaksa Agung Sugiharto (hal 63 dan 64).

Seperti juga kawan Tapolnya, Pramoedya juga sempat mendapat berbagai hukuman dari petugas jaga (Tonwal= peleton kawal) karena dianggap malas, membangkang, dan tidak patuh atau disiplin (hal 67). Lebih dari itu, para petugas yang seakan berperan sebagai pembina sering memeras tapol dengan berbagai cara dan mengambil dengan paksa hasil jerih payah para tapol (hal 74, 75, dan 79).

Mengenai perpecahan dalam tubuh tapol pun sempat dirasakan dan dicatat oleh Pramoedya, bahwa terjadi pengelompokan tapol yang berasal dari Jakarta, Jabar, dan Jawa Timur yang masing-masing mempunyai slogan-slogannya sendiri (hal 213). Oleh karena itu, menurut Pram, dinding barak telah punya mata dan telinga. Cecunguk murahan berkeliaran di setiap penjuru dan di setiap kesempatan (hal 216). Perpecahan dan kelompok itu akhirnya diketahui oleh petugas yang menangkap mereka dengan tuduhan ingin mengacau (hal 215).

Beberapa hal yang menarik sehubungan dengan Unit II Wanareja ialah ciri khusus yang membedakan dari unit lainnya di Inrehab. Di sana mayoritas berasal dari Jakarta dan Jawa Barat (hal 221). Di Pulau Buru, Unit Pramoedya sempat didatangi oleh pejabat dari Jakarta dan berbagai wartawan dalam dan luar negeri serta para sastrawan (hal 59-61). Pertemuan dengan wartawan dianggap oleh petugas sebagai kegiatan berbahaya. Setelah pertemuan dengan wartawan, biasanya para tapol diminta berkumpul untuk melapor apa yang dibicarakan sebelumnya dengan para wartawan atau tamu lainnya (hal 78). Pramoedya menyadari bahwa dirinya menjadi barang tontonan untuk para tamu (hal 79).

Kegelisahan dirasakan oleh Pramoedya bersama rekan tapol lainnya, menyangkut status mereka yang tidak diproses secara hukum, yang menyebabkan ketidakjelasan hidup mereka di masa depan sehingga terjadinya aksesi pelarian tapol (hal 101-102). Berangkat dari kegelisahan dan ketidakjelasan, menyebabkan Pramoedya menjadi pesimis, ketika ditanya oleh wartawan dari Australia yang menanyakan, apakah

Pramoedya mempunyai harapan. Jawaban Pramoedya adalah tidak, selama saya di Buru (hal 114).

Efek peristiwa pelarian yang gagal pada tanggal 12 November 1974 berdampak luas, bukan hanya meningkatnya tekanan, pemerasan, dan siksaan terhadap para tapol yang berlangsung hampir seminggu lebih, akan tetapi juga kemudian meredakan sikap brutal dan kasar dari para petugas terhadap para tapol. Hal ini disebabkan adanya desakan dari pemerintah pusat dan desakan dan protes dari luar negeri. Hal itu terbukti, ketika rombongan wartawan asing datang, mereka akan selalu menanyakan tentang peristiwa kekerasan dan pembunuhan terhadap para tapol, yang mencoba melarikan diri (hal 240).

Pramoedya juga mencatat terjadinya perubahan sosial yang mempengaruhi kehidupan para tapol. Kehidupan para tapol jauh berbeda dibandingkan dengan 8 tahun lewat. Kalau dulu orang tak berpikir mencari sumber penghasilan, sekarang tiap orang tak ada yang berpikir di luar uang. Delapan tahun yang lalu mereka merasa senasib sepenenderitaan. Sekarang di antara mereka ada yang sudah merasa tetap satu nasib, tapi bukan satu penderitaan. Kehidupan mental sudah porak poranda. Tak ada satu usaha pun untuk memulihkan kewajaran kondisi semula. Para tapol sudah seperti layang-layang putus. Menurut Pramoedya, kondisi itu memperlihatkan bahwa jerih payah penguasa memang berhasil (hal 265).

Sejak berada di Pulau Buru, antara tapol dan penguasa terdapat jurang yang sangat dalam. Mereka hanya dipertemukan di garis demarkasi yang memisahkan antara hak dan kewajiban. Komandan dan petugas harus dilayani, harus dihormati, sedangkan tapol harus melayani dan menghormati. Kedudukan tapol adalah sebagai orang yang selalu salah dan selalu harus mengalah. Kondisi ini merupakan rumus di Inrehab yang berlaku sampai Inrehab dibubarkan (hal 265). Pernah juga ucapan seorang wakil Komandan menegaskan tentang perbedaan status dan kedudukan antara petugas dan tapol. Dia mengancam dengan mengatakan bahwa para tapol masih hidup karena adanya rasa kasihan dari mereka. Kalau mereka mau membunuh tapol, tidak akan ada yang menuntut, katanya (hal 270).

Pramoedya dianggap sebagai tapol khusus. Hal itu terlihat ketika diwawancara oleh seorang wartawan Telegraf, bahwa Pramoedya sehari-hari diberikan waktu hanya untuk menulis dengan mesin tulis pemberian teman-temannya dan diberikan kamar sendiri yang tidak bercampur dengan tapol lainnya (hal 167 dan 185). Seperti diakuinya,

di unit S tapol drs SK, pengatur unitnya melancarkan banyak kecaman terhadap aku dan orang-orang seperti aku yang tidak mau mengiyakan saja para pembesar dan penguasa. Pramodeya dianggap sebagai tapol keras kepala sehingga diundurkannya pembebasannya sampai dan dimasukkan sebagai kelompok terakhir yang pulang ke Jawa (hal 200).

Sebelum tahun 1974, administrasi sangat kacau dan tanpa aturan yang jelas, sehingga sering terjadi kebocoran dana pemerintah. Bahkan para petugas yang telah dibiaya oleh pemerintah masih merasa kurang, yang akhirnya untuk menambah kekurangan itu, mereka memeras obyek yang paling lemah, yaitu para tapol (hal 250). Selama tahun 1974-1978 administrasi telah diatur. Berbagai catatan administrasi telah dibuat dan sempat dikumpulkan yang memperlihatkan pengeluaran biaya untuk para petugas yang diberikan oleh pemerintah (hal 250-253). Akan tetapi pihak rumah sakit tak punya catatan tentang jumlah yang dirawat, yang meninggal, dan berbagai penyakit yang muncul di Pulau Buru (hal 261).

Pramoedya mencatat bahwa tingkatan pendidikan SD adalah mayoritas, perguruan tinggi 2 %, SLTA sekitar 15%, SLTP hampir 30%, sarjana muda tercatat 5 orang, sedang sisanya buta huruf yang kebanyakan dari Jakarta (hal 257).

### **3.2 Hersri Setiawan**

Latar belakang para tapol sangat beragam, sejak kedatangan para tapol secara bergelombang ke Pulau Buru, muncul berbagai istilah yang mengacu kepada stratifikasi sosial di antara para tapol itu sendiri, seperti tapol sentral, tapol priyayi, dan tapol kader (hal 152). Tapol juga terdiri atas beberapa kelompok pekerja (regu kerja), yaitu kelompok penggajian, kelompok persawahan, kelompok perladangan, kelompok penggaraman (membuat garam di pinggir pantai Sanleko), kelompok pengangkut barang, dan kelompok lio (pembuat batu bata) (hal 41). Para Tapol itu berdatangan secara bergelombang sejak tahun 1969-1972 berasal dari berbagai tempat tahanan (penjara) yang berada di Pulau Jawa, seperti Salemba dan Tangerang- Jakarta, Kebonwaru-Jawa Barat Nusa Kambangan-Jawa Tengah, dan Luwokwaru-Jawa Timur (hal 47).

Selain bekerja, kewajiban para tapol yang lain, yang merupakan tugas sehari-hari adalah melapor!. Kehidupan tapol sejak bangun pagi sampai menjelang tidur ditandai dengan kewajiban melapor (hal 58). Bahkan setelah mereka dibebaskan pun kewajiban melapor ke koramil setempat tetap diharuskan (hal 219-225)

Di Pulau Buru terbentuk konstruksi sosial yang jelas, yakni para petugas yang mewakili kepentingan dan orientasi pemerintah Orde Baru dan para tapol sebagai tahanan Orde Baru. Konstruksi demikian secara langsung mempersulit interaksi sosial di antara mereka. Apalagi yang dimaksud petugas di sana adalah berasal dari militer (dari Divisi Bataliyon Patimura dan Hasanudin). Dengan demikian terjadi stratifikasi sosial antara yang berkuasa dengan yang dikuasai. Segala hak dari para tapol telah dicabut, yang ada hanyalah kewajiban untuk memenuhi semua perintah dari para petugas. Jika perintah dan tugas tidak dikerjakan atau lalai dalam pekerjaan, tapol harus siap menerima sanksi berbagai hukuman. Hukuman juga dikenakan kepada para tapol, jika mereka berlaku tidak sopan, melanggar disiplin, atau salah menerjemahkan perintah petugas (hal 25-30, dan 69-76). Tiap tapol yang dianggap melawan perintah petugas (mereka menyebutnya kepala batu, banyak mulut, atau ekstrimis) akan dikucilkan di barak tersendiri atau dipindahkan ke unit Jiku Kecil, sebagai tempat pembuangan sementara (hal 95).

Akan tetapi dalam konstruksi sosial tapol pun juga terjadi stratifikasi sosial, antara yang rajin dengan yang malas (*ngulo*) antara kelompok yang menjauhi dari petugas dengan yang mendekati petugas (*cecunguk*), antara yang berstatus intelektual dengan yang biasa, dan antara yang pencuri dengan yang bukan (hal 39 dan 42). Sebutan tapol berangsur-angsur diubah menjadi penghuni dan pada tahun 1974 diubah menjadi warga. Bahkan panggilan untuk tapol juga diubah, yang dulu dipanggil dengan kamu, lalu berubah dengan panggilan saudara. Baik sebutan maupun panggilan, pada dasarnya tidak mengubah kedudukan dan hak para tapol itu sendiri. Sebutan itu hanya merupakan pelembut sementara saja (hal 103-104)

Wujud stratifikasi sosial juga dapat dilihat dari tempat bangunan yang ada di sana, seperti Wisma untuk Komandan, Mes untuk Tonwal, dan Barak untuk Tapol yang masing-masing membawa nilai sendiri-sendiri. Masing-masing melukiskan hak dan kewajibannya. Akan tetapi pada yang bernama Barak hanya kewajiban yang dikenalnya (hal 126). Seperti pengakuan Hersri, di balik permukaan yang tenang, diam-diam terdapat perseteruan antara tapol yang berasal dari penjara Tangerang dengan tapol yang berasal dari penjara Salemba, atau tapol muda dengan tapol tua atau tapol seniman dengan tapol insinyur (hal 161, 181, 221, dan 277).

Pulau Buru juga sering dikunjungi oleh para wartawan dan lembaga kemanusiaan, seperti Palang Merah Internasional. Dalam catatan Hersri kunjungan wartawan dilakukan

pada tahun 1969, 1972, dan 1976. Pada setiap kunjungan mereka dan setelah kunjungan itu, Hersri mencatat adanya berbagai macam hukuman yang ditimpakan kepada para tapol karena para petugas menganggap para tapol telah berbicara sembarangan kepada para tamunya (hal 76-84). Setiap kunjungan itu, para petugas telah mempersiapkan, seakan-akan Tefaaf Pulau Buru, adalah tempat yang baik dan sesuai dengan kehidupan para Tapol. Di sana diperlihatkan sistem kerja yang humanis dengan jaminan kesehatan yang memadai. Padahal, menurut Hersri semua itu hanyalah tipuan propaganda belaka (hal 78-84). Propaganda lainnya adalah pelaksana Pulau Buru menampilkan berbagai foto kondisi wilayah Pulau Buru yang asri dan makmur, serta berbagai foto kehidupan tapol di Pulau Buru yang berhasil mengolah tanah pertanian (hal 131). Propaganda yang sama juga digunakan untuk nama-nama tempat pemukiman para tapol, seperti Bantalareja, Savanajaya, Indrapura, Wanayasa, Wanapura, Sawunggaling, yang mencerminkan kemakmuran, kesuburan, dan kekayaan alam (hal 164).

Berdasarkan juga prosedur pengasingan, keluarga tapol juga akan diikutsertakan untuk ditempatkan di Pulau Buru, maka kemudian Bapreru memerintahkan kepada sebagian tapol untuk membangun 50 rumah tahap pertama untuk menampung keluarga tapol yang akan datang ke pulau itu (hal 119-161). Rombongan pertama keluarga tapol yang akan bermukim di Pulau Buru datang pada tanggal 22 Juli 1972 berjumlah 82 keluarga, yang kemudian menempati lahan perumahan di wilayah Savanajaya dan Bantalareja, yang kemudian dikenal sebagai desa tapol. Tiap kepala keluarga diberikan lahan persawahan dan perladangan (hal 121). Hersri mencatat kedatangan keluarga tapol sebagai berikut: tahun 1972: 82 keluarga, tahun 1974: 62 keluarga, tahun 1975 (Maret): 22 keluarga, (Juli): 3 keluarga, tahun 1977: 2 keluarga (hal 143).

Kedatangan para keluarga tapol telah menimbulkan berbagai ekses sosial, seperti konflik antarkeluarga, konflik anak-anak dengan petugas, konflik antara kaum lelaki dan perempuan atau sebaliknya. Ekses lainnya, tapol dan keluarganya harus hidup lebih keras lagi mengolah tanah tandus di beberapa lokasi di Pulau Buru. Dampak sosial lainnya, terjadi kesenjangan antara pemilik tanah (bisa tapol atau penduduk setempat) dengan tapol penggarap dan terjadinya kesenjangan sosial sesama tapol yang menjurus kepada azas kepentingan individu. Dengan kedatangan keluarga, terjadi perubahan sosial. Banyak tapol kemudian berusaha di bidang jasa. Dengan demikian terbentuk stratifikasi sosial baru. Kebersamaan menjadi luntur karena ikatan ideologis telah rapuh, tergantikan dengan ikatan primordial, seperti arisan antardesa atau antar asal daerah (hal

126-127, 129, 135, 156-160). Secara tidak langsung keluarga tapol yang datang ke Pulau Buru telah dimasukkan juga sebagai tapol golongan B, tanpa nomor foto dan nomor baju ( hal 127).

Akan tetapi menurut Hersri, di dalam sejarah tefaaf tidak ada satu unit pun yang selama 8 bulan masa konsolidasi, mampu bertahan dengan bersandar pada jatah negara semata-mata. Tidak mungkin orang bisa bertahan dengan 500 gram beras campur bulgur sehari(dengan timbangan yang sering dikurangi) tanpa gula tanpa garam, dan tanpa tambahan lainnya. Sementara ia harus bekerja keras (membuka hutan, mengolah tanah) selama dua belas jam sehari bahkan terkadang lebih. Untuk beban keluarga lain lagi mereka buka hanya mengolah tetapi juga harus merawat tanaman dengan musim yang tidak teratur (hal 137). Baik Hersri maupun Pramoedya juga memperhatikan sangat mendetail kondisi dan kehidupan tapol dan mereka pun mengkritik sikap dan tindakan dari tapol yang tidak menolong dan bersifat oportunistis.

### **3.3 Adrianus Gumilar Demokrasno**

Tapol sering mendapatkan penghinaan dari para petugas yang tidak manusiawi (hal 41 dan 48). Bahkan mereka sengaja mencari kesalahan dari para tapol untuk dihukum (hal 73). Untuk mendapatkan tambahan makanan (gizi) tapol menyisihkan waktunya untuk berburu, memancing, berternak, berladang, mencari sagu, dan juga mencuri dari pekerjaan mereka sendiri (hal 55, 90, dan 97). Tapol bekerja rodi ke sawah dan ladang pada jam 06.00 dan pulang jam 17.00 sore, tujuh hari dalam seminggu, tanpa istirahat, kecuali hari-hari besar dan itu pun terkadang hanya setengah hari (hal 74). Seorang komandan unit dan juga petugas pengawal yang telah selesai masa tugasnya akan membawa segala macam barang inventaris unit, termasuk yang dimiliki tapol (hal 111). Berbeda dengan para penulis yang mengungkapkan kondisi dan keberadaan tapol lewat ungkapan bahasa tulis, Demokrasno melakukannya melalui bahasa gambar yang lebih lugas dan nyata.

### **3.5 Kresno Saroso**

Terdapat struktur komando dalam kehidupan tapol. Para anggota regu kerja berasal dari berbagai barak. Tiap regu kerja dipimpin oleh seorang kepala regu yang menerima perintah kerja dari koordinator unit yang menerima perintah dari komandan unit yang kemudian dijabarkan bersama staf koordinator lainnya. Baru kemudian perintah itu

diturunkan kepada kepala-kepala regu (hal 189). Oleh karena kewajiban kerja yang keras, maka banyak para tapol yang membuat ulah untuk menghindari kerja yang lebih keras. Istilah yang populer di Buru ialah ngulo atau glibat-glibet, berusaha menghindari kerja seperti ular. Orang yang seperti itu dijuluki ulo atau paul (panglima ulo). Sebutan lainnya adalah PLMK (phisik lemah makan kuat) dan NSK (napsu seks kuat). Karena juga kewajiban kerja yang keras, banyak tapol yang kemudian menghindari kerja dengan cara mengubah kepercayaan mereka, dari Islam menjadi Kristen, agar mendapat jatah waktu istirahat menjadi lebih lama pada waktu hari minggu. Hal itu dilakukan oleh Kresno Saroso (hal 193).

Yang sering menjadi pertentangan di antara para tapol adalah masalah kerja. Di satu sisi koordinator dan stafnya mendapat tekanan penguasa untuk melaksanakan target kerja. Di lain pihak tapol pun tidak mau terlalu ditindas dalam melaksanakan pekerjaannya. Di samping itu ada kontradiksi, apakah hasil pekerjaan mereka itu nanti sepenuhnya untuk kepentingan para tapol sendiri ataukah para tapol dipaksa bekerja untuk kepentingan penguasa.(hal 194).

Pengakuan Kresno: saya yang mahasiswa fakultas kedokteran UI tingkat IV sudah tentu tidak merasa senang diperlakukan sebagai pesuruh oleh orang yang tidak berpendidikan dan ber-IQ jongkok. Tetapi yang namanya wong kalah , mau apa lagi kalau tidak nurut. Para tonwal itu melakukan aji mumpung karena sedang merasa menang, maka mereka bertindak seenaknya (hal 212).

Cara pengiriman surat: untuk menghubungi keluarga masing-masing, tapol diberi kartu pos khusus Bapreru yang dapat diposkan tanpa diberi perangko. Setelah kartu pos ditulis, kemudian dikumpulkan oleh kepala barak dan diserahkan kepada komandan unit yang dibawa ke Namlea untuk disensor. Prosedur yang sama juga dilakukan pada paket surat yang berasal dari keluarga tapol (hal 231).

Dengan kedatangan keluarga para tapol di Savanajaya, maka persoalan di sana menjadi bertambah sulit. Hal itu berkaitan dengan interaksi antara perempuan dan lelaki yang lama ditinggal istri atau jarang melihat perempuan. Terjadi dan munculnya kasus perselingkuhan antara yang bujangan dengan istri seseorang atau melibatkan pasangan-pasangan suami istri (hal 235 dan 237). Kresno juga termasuk tapol yang dipindahkan dari Unit Savanajaya ke Unit Wanapura (tanpa keterangan tanggal, bulan, dan tahun). Perpindahan ini selain untuk mengawasi aktifitas tapol juga untuk mempersiapkan masuknya keluarga tapol. Itu kemungkinan terjadi pada tahun 1974 (hal 247). Gejala itu

dilihat oleh Kresno, pada tahun 1975 menyusul perpindahan para tapol golongan elite yang dulu berstatus pimpinan dipindah dari seluruh unit di Pulau Buru ke Unit 15 dan 13. sebaliknya tapol dari kedua unit itu dipindah ke unit lain. Selain itu juga terjadi penciutan kelompok dari 16 kelompok di satu unit menjadi 10 kelompok. Kelompok 1-5 mendapat rumah di tengah unit, sedangkan sisanya menempati rumah di pinggir unit. Selain itu, tokoh budaya dipindah ke Unit Mako yang mudah diawasi. Pramoedya, Hasyim Rachman bersama dalang terkenal Tristuti, termasuk yang dipindah ke Mako (hal 257, 271, dan 278).

Menurut Kresno hasil kunjungan delegasi ICRC (palang merah Internasional) tidak terlalu terasa bagi para tapol (hal 275). Tahun 1976 tapol diberikan banyak kebebasan. Pada tahun itu tapol diizinkan menonton televisi (TVRI) di Mako, khususnya berita jam 17.00 dan jam 19.00. Sedangkan untuk berita jam 21.00 masih dilarang. Setelah itu, televisi diadakan di Unit I. Sebelumnya tapol juga sudah diizinkan memiliki tape recorder tanpa radio. Tapol boleh mengadakan kunjungan ke unit lain, diadakannya kompetisi olah raga antarunit. Selain itu sudah diizinkan beroperasinya juru foto (hal 292-295). Ada beberapa data dan gambaran yang mungkin tidak sempat terekam oleh penulis lainnya itu, akhirnya dapat dikemukakan oleh Kresno, seperti terungkap dari tulisannya di atas.

### **3.5 Suyatno Prayitno**

Satu Unit dipimpin oleh Komandan Unit yang dibantu oleh wakilnya. Kebanyakan dari jajaran CPM. Biasanya berpangkat Letnan Satu dan Dua. Di samping itu masih dibantu oleh dua orang staf, kesehatan dan pertanian. Dalam satu Unit terdapat satu regu Tonwal jumlahnya kira-kira 30 orang per unit, umumnya dari angkatan darat. Para petugas hidupnya dibiayai oleh pemerintah, akan tetapi harus juga ditanggung oleh warga unit yang menyebabkan terjadinya pemerasan terhadap para tapol. (hal 78). Pekerjaan Komandan Unit dan stafnya hanya mondar-mandir mengontrol kerja tapol. Selain itu, mereka juga suka berburu, marah-marah, memukul, dan menghukum tapol yang dianggap salah (hal 79). Setiap barak mempunyai pengurus, terdiri atas ketua, wakil ketua, penulis, bagian keamanan, dan bagian kesejahteraan (hal 79). Walaupun gambaran dari Prayitno lebih singkat dibanding dengan penulis lain, akan tetapi terdapat data yang dapat juga digunakan sebagai tambahan gambaran tentang Pulau Buru.

## **4. Pembebasan**

Dalam sesi terakhir ini akan dikemukakan masa pembebasan yang dialami oleh para penulis. Proses pembebasan memang sudah dimulai sejak tahun 1977, akan tetapi masih bersifat terbatas. Proses pembebasan juga menjadi harapan dari banyak tapol di Pulau Buru dan hal itu sebagian besar terekam dari para penulis di bawah ini.

#### **4.1. Pramoedya Ananta Toer**

Bagi tapol yang akan dibebaskan harus mendatangi surat perjanjian sumpah yang intinya adalah: takkan menyebarkan dan mengembangkan komunisme, marxisme-leninisme, takkan mengganggu keamanan, ketertiban, dan stabilitas politik, takkan khianat pada bangsa dan Negara yang bersendi Pancasila dan UUD 45, tetap bersedia dipanggil oleh penguasa, dengan ikhlas menerima segala tindakan terhadap dirinya oleh Kopkamtib dan tidak akan melakukan tuntutan atau gugatan terhadap pemerintah RI dengan ikhlas dan berbakti kepada nusa dan bangsa. Sumpah dan janji itu ditutup dengan kalimat: demikianlah sumpah ini saya ucapkan dengan ikhlas dan tanpa adanya paksaan dalam bentuk apapun di hadapan yang berwajib selaku wakil pemerintah RI dan menjadi tanggungan saya terhadap segala akibat-akibatnya apabila saya mengingkari sumpah ini (hal 196).

Kata bebas merupakan impian dan harapan. Sehingga ketika ada proses pembebasan, beberapa tapol malah tidak mempercayainya. Pembebasan itu sendiri menurut seorang wartawan asing disebabkan oleh adanya desakan dari Jimmy Carter yang tidak mau membiayai lagi proyek kemanusiaan Pulau Buru itu yang berkeinginan untuk merehabilitasi tapol menjadi pancasilais (hal 289 dan xi).

#### **4.2. Hersri Setiawan**

Karena keterdesakan atas siksaan, para tapol mempunyai imajinasi dan mimpi bahwa sewaktu-waktu mereka akan ditolong untuk dibebaskan oleh bala bantuan dari kapal penyelamat yang berwarna putih berbendera merah (hal 107 dan 118). Dalam lampiran buku Hersri diperlihatkan bagaimana pihak penguasa Pulau Buru menyensor semua surat masuk dan keluar. Selain itu, juga diperlihatkan surat perjanjian dan sumpah tapol, setelah mereka dinyatakan bebas sebagai tapol. Akan tetapi tetap harus melapor. Walaupun bebas, status mereka tidak banyak berubah. Mereka kemudian disebut sebagai Eks-Tapol yang salah satu petunjuknya itu dicantumkan dalam KTP mereka (hal 219--226).

### **4.3. Adrianus Gumelar Demokrasno**

Rombongan tapol yang dibebaskan pada tahun 1977 berasal dari hasil seleksi yang mengutamakan tapol yang telah berumur dan tapol yang sakit. Akan tetapi mereka tetap diperlukan sebagai pesakitan dengan perlakuan kasar seperti biasa (hal 126). bersamaan dengan pembebasan para tapol, maka berdatanganlah para transmigrasi dari Jawa (hal 130). Rombongan terakhir yang dibebaskan dari Pulau Buru terjadi pada bulan November 1979. Bedanya dengan para petugas yang membawa kekayaannya, para tapol pulang dalam keadaan tidak menentu dengan cap status sosial eks-tapol yang sangat birokratis (hal 132).

### **4.4. Kresno Saroso**

Pada semester kedua tahun 1977 tapol tua dan sakit-sakitan dibebaskan ke tempat asalnya, jumlah mereka hanya 25 saja dari keseluruhan tapol. Pembebasan selanjutnya tahun 1978 secara bergelombang yang juga dikhususkan bagi tapol yang berpenyakit kronis untuk tujuan Jawa. Banyak tapol yang kemudian mendaftar (hal 298--300).

Menjelang pembebasan tahun 1979 di Unit 15 dan 16 mulai dibangun perumahan untuk transmigran. Ada ditemukan tapol yang dibebaskan tahun 1978, kembali lagi tahun 1979 sebagai transmigran. Pada tahun 1979 terdapat tiga gelombang pemulangan atau pembebasan. Kresno bersama Pramoedya termasuk tapol gelombang terakhir yang dibebaskan penguasa Orde Baru dari Pulau Buru. Pada pagi hari diadakan upacara sumpah dan janji para tapol dan kemudian diberangkatkan pada sore hari (hal 315--318). Di atas kapal tapol diberi sebuah tas, sepasang sepatu, dan surat pembebasan. Para tapol kemudian diturunkan di Pelabuhan Tanjung Priok dan kemudian dikumpulkan di koramil masing-masing, setelah itu mereka dijemput oleh keluarganya dan pulang ke rumah (hal 319).

### **4.5 Suyatno Prayitno**

Prayitno tinggal di unit Sawunggaling yang terletak di wilayah tengah Pulau Buru. Prayitno dibebaskan pada tanggal 16 Desember 1977. seperti sewaktu kedatangannya, dia meninggalkan Sawunggaling dengan berjalan kaki. Dia mendapat salam hangat dari komandannya yang pernah menjadi teman main bridge setiap malam minggu (hal 90).

Dari uraiannya di atas, tampaknya pengalaman Prayitno tidak semenderita kawan penulis lainnya.

## **5. Kritik Para Penulis**

Pada sesi ini akan dikemukakan kritik dari para penulis mengenai pengasingan mereka di Pulau Buru. Kritik itu tentu ada persamaan dan perbedaan dari para penulis, tergantung dari cara penglihatan dan pengalaman hidup mereka masing-masing dalam menanggapi kekerasan hidup di Pulau Buru.

### **5.1 Pramodya**

Di buku ini Pramodya seakan ingin membela dirinya bahwa dia tidak bersalah, pemerintah Orde Barulah yang bersalah. Pembelaan itu diungkapkannya secara sinis dan satir kepada rezim Orde Baru yang melakukan penahanan tanpa melalui prosedur hukum. Ketika pembebasan pertama, Pramodya yang diisukan akan bebas ternyata tidak. Kejadian itu menyebabkan Pramodya mengel dan memperlihatkan kemarahannya dengan pernyataan bahwa dirinyalah yang dulu pernah berjuang membela tanah air, akan tetapi sekarang malah disia-siakan dan tidak diperdulikan hak hidupnya, apalagi ditegaskan olehnya bahwa kebebasan merupakan haknya yang bukan hanya diberikan, tetapi juga harus direbut (hal 177, 178 , dan 200).

Tekanan yang dihadapi oleh para tapol menyebabkan tapol mengambil jalan untuk tidak berbicara atau bertanya. Dengan demikian mereka menjadi orang-orang bisu, yang hanya mengenal kata *Ya*, sebagai penerima perintah saja. Gejala itu yang kemudian dijadikan judul dari buku Pramodya, yaitu *Nyanyian Sunyi Seorang Bisu* (hal 124 dan 135).

Menurut Pramodya penulisan memoarnya ini didasarkan pada pertimbangan apa dan bagaimana pun pengalaman pribadi, apalagi dituliskan, ia menjadi bagian dari pengalaman suatu bangsa dan umat manusia pada umumnya. Ditandaskan bahwa, pengalaman merupakan hak pribadi yang tidak dapat dirampas (hal viii-ix). Menurut Pramodya, sejak tahun 1965, ia dan banyak kawannya telah kehilangan haknya sebagai manusia. Dengan kata lain, hak mereka telah dirampas oleh Negara (hal 6). Sebagian tapol, termasuk Pramodya berfikir bahwa kepergian mereka ke Pulau Buru dianggap lebih baik daripada kehidupan mereka di penjara yang sempit (hal 9). Akan tetapi

masalah yang dihadapi mereka hampir sama, yakni perampasan haknya sebagai manusia.

Pramoedya memandang bahwa pengasingan tapol PKI ke Pulau Buru adalah juga atas inisiatif Negara Barat (AS) yang mempengaruhi dan membantu pemerintah Orde Baru (hal 10). Pramoedya menilai bahwa telah terjadi kesalahan, baik dari pemerintah, yang disimbolkan sebagai dewa maupun dia dan teman-temannya sesama tapol yang memilih dan menjadi warga Negara Indonesia, akan tetapi dipersulit kehidupannya (hal 12). Pramoedya sadar dan semakin mengerti ketika temannya, seorang tapol mengatakan bahwa benar-benar rugi menjadi dan dilahirkan sebagai warga Negara Indonesia (hal 201).

Ditekankannya olehnya, bahwa boleh saja dan mungkin dapat suatu pemerintah atau pun suatu rezim berusaha untuk menutupi dan melupakan sejarah kelabunya, akan tetapi menurut Pramoedya, melupakan sejarah berarti membodohi diri, dunia, dan hati nurani sendiri (hal 200). Oleh sebab itu, sejarah yang kelabu pun harus terus diingatkan. Tulisannya itu diakhiri dengan suatu harapan, bahwa tempat ini, dengan peristiwa-peristiwanya tak akan dilupakan. Betapapun mungkin tempat ini pada suatu saat kembali menjadi hutan atau berubah menjadi sebuah kota ramai. (Wanareja akhir Februari 1979) (hal 268).

Sampai tahun 1978, sebagaimana dicatat oleh Pramoedya terdapat 310 kematian, dengan rincian sakit 191 orang, dibunuh petugas 53 orang dengan berbagai macam alasan maupun tanpa alasan, kecelakaan 35 orang, bunuh diri 15 orang, lain-lain sebanyak 16 orang ( Pramoedya dalam Harsutejo, hal xxi). Data-data itu dianggap sebagai pembuktian bahwa telah terjadi perampasan hak dari manusia pekerja, manusia yang sakit, maupun sebagai manusia yang bebas. Singkatnya, dalam dua bukunya itu, Pramoedya secara pedas mengeritik sistem dan cara pengasingan model Pulau Buru yang tidak manusiawi itu.

## **5.2 Hersri Setiawan**

Seperti dikemukakan oleh Budiawan, sejarawan yang memberikan kata pengantar dalam buku Hersi, diperkirakan 10.000 lebih warga Negara Indonesia dikirim ke penjara alam Pulau Buru sebagai tapol yang dianggap sebagai anggota, kader, dan simpatisan PKI (hal 7). Dalam narasi sejarah rezim Orde Baru, pembantaian dan penahanan massal serta pengalaman getir para tapol di Pulau Buru (dan di tempat lain di Indonesia)

dianggap tidak pernah ada (hal 8). Ribuan tapol dipaksa oleh rezim Orba untuk menjalani hidup tanpa harkat dan martabat kemanusiaan di Pulau Buru selama hampir sepanjang dasawarsa 1970-an (hal 9).

Dengan buku memoar ini, kita diajak untuk melihat ironi dan tragedi rezim Orba (hal 10). Buku Hersri dianggap tidak berpretensi untuk membela diri dan sama dengan semua otobiografi atau memoir mantan tapol yang lain, buku ini sama sekali tidak menunjukkan hasrat untuk melakukan pertobatan, jika bukan pembelaan diri (hal 10-11). Buku ini hanya ingin berbagi pengalaman, sembari berharap bahwa pengalaman pahit para mantan tapol itu juga dicatat dalam narasi sejarah Indonesia mutakhir, tak lain agar seluruh tragedi kemanusiaan setelah peristiwa 1965, tidak berulang kembali (hal 11). Memoar ini juga merupakan suatu keberanian untuk menuturkan apa yang dialaminya sebagai pengalaman hidup kepada masyarakat luas. Dengan adanya memoar ini secara tidak langsung telah membongkar sensor terhadap sejarah yang pernah mengundang pertanyaan dan misteri, sekitar keberadaan tapol periode Orde Baru, khususnya tapol Pulau Buru.

### **5.3 Adrianus Gumelar Demokrasno**

Pembuangan Pulau Buru merupakan kamp konsentarsi model Orde Baru yang memadukan pengasingan model rezim Hindia Belanda, Nazi, dan juga Gulag Uni Soviet (sic!). Secara tidak langsung kondisi alam Pulau Buru telah menjadi penjara alam bagi tapol PKI atau yang dianggap simpatisan PKI. Hal itu diungkapkan oleh Harsutejo, sebagai tokoh yang memberi kata pengantar dalam buku Demokrasno (hal xxii). Menurut Demokrasno, diperkirakan bahwa rezim Orba berencana menahan tapol di Pulau Buru sampai punah secara alamiah. Akan tetapi atas desakan pihak keluarga dan pihak luar negeri, akhirnya pemukiman tapol diubah menjadi model desa transmigrasi (hal 102). Dan itu secara tidak langsung telah menyelamatkan mereka dari kepunahannya.

### **5.4 Kresno Suroso**

Setelah bekerja lama di Pulau Buru, Kresno bisa mengambil kesimpulan, bahwa kompensasi atas hasil kerja dari para tapol, hanya cukup untuk memenuhi KSF (kebutuhan fisik sangat minimum). Selebihnya merupakan hak preogratif penguasa, bahkan kalau bisa penguasa berusaha memeras para tapol sampai habis. (hal 194).

Mungkin maksud penguasa menjadikan tefaaf Buru semacam pertanian kolektif yang banyak terdapat di negara RRC dan Uni Soviet. Kresno sendiri tidak tahu, mengapa pihak penguasa justru meniru sistem kolektif pertanian negara-negara sosialis yang secara ideologis seharusnya ditentangnya. Tetapi mungkin dengan sistem kolektif, maka eksploitasi para tapol bisa dilakukan secara lebih mudah (hal 265).

Kritik lain dari Kresno, bahwa dari pengamatannya sistem komunis bukannya menyamaratakan kemakmuran, melainkan menyamaratakan kemiskinan. Dan dari pengamatannya juga dalam sistem sosialis massa rakyat dibiarkan tetap miskin, tetapi *the ruling clas* (klas penguasa) terus mendapat *previlege* tertentu. Ini tidak saja di negara sosialis, tetapi juga dalam penjara, di mana para tapol yang berideologi sosialis ditahan. Di penjara Salemba dan Tangerang, pimpinan dan kader partai diistimewakan dan dijaga supaya jangan sampai kelaparan. Sedangkan tahanan lainnya yang tidak mempunyai peran dan fungsi apa pun dalam partai dibiarkan, dan mati pelan-pelan. (hal 304).

Bukan hanya di Pulau Buru, tapol pimpinan dan intelektual dipisahkan dari tapol lainnya. Seperti yang diamati oleh Kresno bahwa ada desas-desus bahwa Pramodya dan sejumlah 80 mantan tapol dimasukan golongan istimewa dan mendapat tempat tersendiri di kapal dan tidak boleh bercampur dengan mantan tapol lainnya. Mereka juga diturunkan lebih dulu di Tanjung Perak, Surabaya dan terus melanjutkan perjalanan lewat darat (hal 318).

## 6. Penutup

Selain enam buku memoir di atas masih terdapat beberapa buku memoir sejenis, di antaranya dari Moestahal H. Achmadi. *Dari Gontor ke Pulau Buru: Memoar H. Achmadi Moestahal*, penerbit Syarikat Yogyakarta, tahun 2002. Buku ini tidak dapat saya temukan, sehingga saya tidak masukan dalam pembahasan. Pembahasan keenam buku ini dilakukan dengan cara mengklasifikasikan secara kronologis dari kedatangan sampai kepulangan para tapol. Keenam buku itu masing-masing mempergunakan alur yang sama. Di antara deskripsi kedatangan dan kepulangan terdapat deskripsi tentang kondisi tempat, hubungan antartapol dan hubungan antara tapol dengan petugas jaga. Hal lain yang umumnya dimunculkan pada deksripsi adalah pernyataan penulis yang kritis, skeptis, dan satiris terhadap perlakuan pemerintah yang dalam hal ini diwakilkan oleh para petugas, yang tidak humanis. Para tapol dianggap sebagai benda yang dapat dieksploitasi kapan saja, bahkan terkadang dianggap tidak berharga sebagai manusia.

Kondisi demikian tidak berbeda dengan apa yang juga pernah dirasakan oleh para tahanan di Gulak Siberia pada periode zaman Uni Soviet. Hal itu pernah diungkapkan dalam beberapa karya memoar-fiksi dari Alexander Solzhenitsin tentang tahanan politik semasa rezim Komunis Uni Soviet berkuasa. Kritik lain yang dirasakan oleh mereka adalah, bahwa model penahanan dan kekerasan yang dialami para tapol, adalah lebih dari yang pernah dilakukan oleh rezim militer semasa pendudukan Jepang di Hindia Belanda. Bahkan pada periode penjajahan di Hindia Belanda, tapol ditahan secara menusiawi. Hal dapat dilihat dari pengakuan (memoar) dari para tapol yang pernah dibuang ke Digul.

Pramoedya, Hersri, maupun Demokrasno mengungkapkan memoar tentang Pulau Buru dengan cara yang sinis dan kritis, sekaligus lucu serta mengharukan. Sedangkan penulisan memoar dari Kresno tampaknya juga tidak terlalu memperlihatkan pretensi untuk membela diri. Tulisannya sederhana dan bersifat populer, sebagaimana diungkapkan oleh penerbitnya, bahwa kekuatan buku ini justru terletak pada status penulisnya yang bukan seorang tokoh. Sebagai orang kebanyakan, penulis bisa secara jernih dapat menggambarkan berbagai peristiwa melintas di hadapannya yang direkam dari sudut orang biasa. Walaupun memoar bersifat subyektif yang ditulis oleh orang yang berbeda latar belakang dan profesi, akan tetapi juga perlu diakui nilai-nilai kemanusiaan juga muncul dari ketujuh memoar itu. Secara tidak langsung ketujuh buku ini telah saling melengkapi data dan gambaran tentang kehidupan tapol di Pulau Buru. Tentunya kekurangakuratan data dan gambaran lainnya, dapat diperbaiki dan dikoreksi melalui editorial pada buku selanjutnya.

Walaupun terdapat perbedaan penulisan dan cara pandangan dari masing-masing penulisnya, yang jelas terdapat kesamaan umum bahwa gejala penerbitan buku ini, ingin memperlihatkan adanya peristiwa sejarah kemanusiaan yang perlu untuk diingat dan dimasukkan dalam bagian dari perjalanan sejarah Indonesia, yang selama ini ada kesan untuk ditutup-tutupi dan dianggap tidak pernah ada. Dalam konteks sejarah, suatu tulisan pendek berupa suatu laporan secara tidak langsung dapat mengungkapkan suatu peristiwa dan jika sesuai dengan metode sejarah, tulisan itu dapat saja dijadikan sumber sejarah. Sebagai bagian dari historiografi, buku memoar ini pun sungguh baik untuk dijadikan rujukan sejarah dalam mengungkapkan penahan tapol akibat peristiwa berdarah tahun 1965. Penerbitan buku memoar ini tentunya juga berusaha untuk mengungkapkan tentang adanya penahanan secara tidak prosudural terhadap hampir 20.000 lebih orang

Indonesia dalam periode rezim militer otoritarian Orde Baru di Indonesia. Akankah peristiwa ironis sekaligus tragis seperti itu akan terulang dan diulang ?. Penerbitan buku ini pun tampaknya juga untuk mengingatkan para pembaca bahwa peristiwa seperti itu tidak semestinya diulang dan dilupakan.

### **Daftar Acuan**

- Demokrasno, Gumelar A, 2005. *Dari Kalong Sampai Pulau Buru: Kisah Tapol dalam Sketsa:11 Tahun dalam Sekapan Penjara, Pembuangan, dan Kerja Rodi*. Yogyakarta: Pusat Sejarah dan Etika Politik.
- Mrazek, Rudolf. 2000. *Pramoedya Ananta Toer dan Kenangan Buru*. Yogyakarta: Cermin.
- Suyatno, Prayitno. 2003. *Kesaksian Tapol Orde Baru: Guru, Seniman, dan Prajurit Tjakra*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi dan Pustaka Utan Kayu.
- Saroso, Kresno. 2002. *Dari Salemba ke Pulau Buru: Memoar Seorang Tapol Orde Baru*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi dan Pustaka Utan Kayu.
- Setiawan, Hersri. 2004. *Memoar Pulau Buru*. Magelang: IndonesiaTera.
- , 2006. *Diburu di Pulau Buru*. Yogyakarta: Galang Press.
- Toer, Pramoedya Ananta. 1995. *Nyanyian Sunyi Seorang Bisu*. Jakarta: Lentera.
- , 1997. *Nyanyian Sunyi Seorang Bisu II*. Jakarta: Lentera.

### **Tentang Penulis:**

Zeffry Alkatiri, Doktor Bidang Ilmu Sejarah dari FIB UI. Pengajar dan Peneliti di FIB UI. Judul Disertasi: "Transisi Demokrasi dan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Negara Federasi Rusia tahun 1992-1999". Pernah mendapat penghargaan sebagai penulis buku sajak terbaik dari Dewan Kesenian Jakarta, tahun 2000 Buku sajaknya berjudul " Dari Batavia sampai Jakarta 1619-1999: Sejarah Jakarta dalam Sajak". Buku tersebut pada tahun 2002 mendapat penghargaan sebagai buku sajak terbaik dari Yayasan Buku Utama.